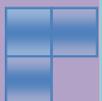




# Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Inspektorat Tahun 2023 Kabupaten Balangan

INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN  
Jl. A. Yani Km. 3,5 Paringin Telp. (0256) 2028395 Fax. (0526) 2028248  
Paringin Selatan 71662  
Email : [Inspektoratblg@gmail.com](mailto:Inspektoratblg@gmail.com)



## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Parangin, Juli 2023

Inspektur Kabupaten Balangan



Drs. Urai Nur Iskandar, MM

NIP. 19730501 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah .....	4
2.2 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan keuangan.....	10
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan.....	21
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	22
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	
3.1. Tujuan dan Sasaran .....	24
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	24
3.3. Rencana Perubahan Renja .....	27
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	32

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (comon goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2023 adalah:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengawasan antar wilayah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2023 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2023. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

## 1.3 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

#### 1.4 **SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab 4 Penutup

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Balangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2022 dan capaian target Renstra Inspektorat, pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
3	4	5	6	7	11	12	13=12/7x100%		14=6+12	15=14/5x100%		16
		K	K	K	K	K	K	Rp	K	K	Rp	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	74 BB	73.03 BB	71 BB	76,02 BB	76,02 BB	107.07	94.12	76.02 BB	102.73	22.31	
	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00		100,00 Persen	100		
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disampaikan Dengan Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	70.42	200 Persen	200	22.58	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	79.1	200 Persen	200	24.16	INSPEKT ORAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	57.68	200 Persen	200	20.15	INSPEKT ORAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	95.03	200 Persen	200	32.69	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	95.03	200 Persen	200	32.69	INSPEKT ORAT

# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100.00	87.75	200 Persen	200	33.67	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	320 Stell	70 Stell	40 Stell	40 Stell	40 Stell	100.00	92.26	110 Stell	34.38	65.19	INSPEKTORAT
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	140 Pegawai	40 Pegawai	20 Pegawai	28 Pegawai	28 Pegawai	140.00	86.1	68 Pegawai	48.57	29.22	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 Persen	100.00	95.85	200 Persen	200	49.11					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100.00	96.84	200	200	93.84	INSPEKTORAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	41.44	24 Bulan	33.33	23.78	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720 Eksemplar	120 Eksemplar	120 Eksemplar	120 Eksemplar	120 Eksemplar	100.00	84.29	240 Eksemplar	33.33	21.99	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	100.00	98.85	200 Persen	200	44.54	INSPEKTORAT				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100 Persen	100.00	99.35	200 Persen	200	65.92					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100.00	99.38	2 unit	40	55.27	INSPEKTORAT
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	14 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	100.00	99.33	8 Bulan	57.14	70.29	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	79.39	24 Bulan	33.33	27.6	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	39.87	24 Bulan	33.33	21.13	INSPEKTORAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	100.00	89.47	200 Persen	200	26.21	INSPEKTORAT				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	74.94	24 Bulan	33.33	28.96	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	9 Bulan	75.00	87.06	21 Bulan	29.17	51.37	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 Persen	100.00	73.95	200 Persen	200	37.09	INSPEKTORAT				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 Persen	100.00	73.95	200 Persen	200	37.09	INSPEKTORAT				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang layak fungsi	100 Persen	100.00	96.89	200 Persen	200	80.67	INSPEKTORAT				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang layak fungsi	100 Persen	100.00	96.89	200 Persen	200	80.67	INSPEKTORAT				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	9 Bulan	75.00	87.06	21 Bulan	29.17	51.37	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 Persen	100.00	73.95	200 Persen	200	37.09	INSPEKTORAT				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 Persen	100.00	73.95	200 Persen	200	37.09	INSPEKTORAT				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang layak fungsi	100 Persen	100.00	96.89	200 Persen	200	80.67	INSPEKTORAT				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang layak fungsi	100 Persen	100.00	96.89	200 Persen	200	80.67	INSPEKTORAT				

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85 Persen	89 Persen	75 Persen	92 Persen	92 Persen	122.67	90.24	92 Persen	108.24	18.53	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	70 Persen	43 Persen	50 Persen	66 Persen	66 Persen	132.00	72.54	109 Persen	155.71	18.95	
	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	80 Persen	50 Persen	65 Persen	40 Persen	40 Persen	61.54		40 Persen	50		
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disampaikan tepat waktu	198 LHP	0 LHP	33 LHP	33 LHP	33 LHP	100.00	95.2	33 LHP	16.67	15.85	INSPEKT ORAT
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan tepat waktu	50 LHP	0 LHP	10 LHP	8 LHP	8 LHP	80.00	60.31	8 LHP	16	9.88	INSPEKT ORAT
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	12 LHP	2 LHP	2 LHP	2 LHP	2 LHP	100.00	88.21	4 LHP	33.33	29.24	INSPEKT ORAT
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	6 LHP	1 LHP	1 LHP	1 LHP	1 LHP	100.00	31.67	2 LHP	33.33	23.25	INSPEKT ORAT
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang disampaikan tepat waktu	36 LHP	4 LHP	3 LHP	2 LHP	2 LHP	66.67	99.56	6 LHP	16.67	306.55	INSPEKT ORAT
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti	425	52	55	65	65	118.18	60.72	117	27.53	15.63	INSPEKT ORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD/Desa di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	62 Persen	83 Persen	50 Persen	86 Persen	86 Persen	172.00	97.97	169 Persen	272.58	42.72	
	Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan	100 Persen	100.00		100 Persen	100						
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Prosentase penyelesaian kerugian daerah	85 Persen	50 Persen	70 Persen	92 Persen	92 Persen	131.43	96.75	142 Persen	167.06	160.8	INSPEKT ORAT
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan tepat waktu	438 LHP	91 LHP	73 LHP	116 LHP	116 LHP	158.90	99.66	207 LHP	47.26	28.81	INSPEKT ORAT

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	12 SKPD	0 SKPD	4 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	-	91.99	0 SKPD	0	40.28	
	Level Maturitas SPIP	3.2	3,023	3,023	3,023	3,023	100.00		3.02	94.47		
	Indeks Integritas	82	76.52	78	75.36	75.36	96.62		75.36	91.9		
	Level kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	100.00		3	100		
Pendampingan dan Asistensi	Prenstase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	91.99	200 Persen	200	40.28	
	Nilai PMPRB	75 Persen	75.63 Persen	70 Persen	72,48 Persen	72,48 Persen	103.54		72 Persen	96.64		
	Persentase Pencapaian Indikator MCP	79 Persen	83 Persen	75 Persen	86 Persen	86 Persen	114.67		86 Persen	108.86		
	Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM	14 SKPD	3 SKPD	6 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	50.00		3 SKPD	21.43		
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Profil Rosiko SKPD	180	30	30	0	0	-	35.35	30	16.67	18.66	INSPEKTORAT
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dilakukan PMPRB	25	10	12	10	10	83.33	99.44	20	80	177.95	INSPEKTORAT
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pemenuhan Data Dukung Indikator MCP	94	83	90	86	86	95.56	95.61	169	179.79	24.88	INSPEKTORAT
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Prosentase unit kerja yang lulus verifikasi data dukung penilaian WBK/WBBM	100	30	60	60	60	100.00	56.73	90	90	14.72	INSPEKTORAT

## 2.2 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Triwulan II 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	74 BB	66.390.740.438	76.02 BB	9.952.507.530	72 BB	16.182.268.310	73,95 BB	6.219.591.551	102,71	38,43	73.95 BB	6.219.591.551,00	99,93	9,37	
	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 Persen		100 Persen		100 Persen		50 Persen		50,00		50,00 Persen		50,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disampaikan Dengan Baik	100 Persen	373.439.580	100 Persen	70.228.424	100 Persen	74.662.400	50 Persen	27.374.520	50,00	36,66	150 Persen	97.602.944,00	150,00	26,14	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	226.096.970	2 Dokumen	46.925.924	2 Dokumen	23.978.400	1 Dokumen	0	50,00	0,00	3 Dokumen	46.925.924,00	25,00	20,75	INSPEKTORAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	24 Laporan	147.342.610	4 Laporan	23.302.500	4 Laporan	50.684.000	2 Laporan	27.374.520	50,00	54,01	6 Laporan	50.677.020,00	25,00	34,39	INSPEKTORAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen	30.814.979.700	100 Persen	5.972.822.230	100 Persen	7.119.790.460	50 Persen	4.342.695.241	50,00	60,99	150 Persen	10.315.517.471,00	150,00	33,48	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3805 orang	30.814.979.700	630 orang	5.972.822.230	630 orang	7.119.790.460	270 orang	4.342.695.241	42,86	60,99	900 orang	10.315.517.471,00	23,65	33,48	INSPEKTORAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	16.305.310.520	100 Persen	440.729.059	100 Persen	3.329.853.000	50 Persen	395.538.892	50,00	11,88	150 Persen	836.267.951,00	150,00	5,13	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 paket	485.125.000	3 paket	124.050.000	4 paket	105.133.000	1 paket	29.160.000	25,00	27,74	4 paket	153.210.000,00	28,57	31,58	INSPEKTORAT
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240 pegawai	4.277.058.490	25 pegawai	316.679.059	54 pegawai	808.890.000	30 pegawai	300.008.892	55,56	37,09	55 pegawai	616.687.951,00	22,92	14,42	INSPEKTORAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110 pegawai	11.543.127.030	0 pegawai	0	20 pegawai	2.415.830.000	74 pegawai	66.370.000	370,00	2,75	74 pegawai	66.370.000,00	67,27	0,57	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 Persen	10.105.074.242	100 Persen	1.404.158.037	100 Persen	3.638.354.900	50 Persen	1.102.024.954	50,00	30,29	150 Persen	2.506.182.991,00	150,00	24,80	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	5.990.805.730	4 Paket	319.521.580	12 Paket	1.244.722.200	3 Paket	654.630.000	25,00	52,59	7 Paket	974.151.580,00	24,14	16,26	INSPEKTORAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	239.991.126	2 paket	26.120.000	2 paket	51.290.000	2 paket	21.859.800	100,00	42,62	4 paket	47.979.800,00	33,33	19,99	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	720 dokumen	61.122.840	120 dokumen	7.080.000	120 dokumen	4.799.700	36 dokumen	2.840.000	30,00	59,17	156 dokumen	9.920.000,00	21,67	16,23	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325 Laporan	3.813.154.546	60 Laporan	1.051.436.457	60 Laporan	2.337.543.000	65 Laporan	422.695.154	108,33	18,08	125 Laporan	1.474.131.611,00	38,46	38,66	INSPEKTORAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKB	100 Persen	2.193.862.000	100 Persen	795.650.000	100 Persen	690.085.800	50 Persen	42.500.000	50,00	6,16	150 Persen	838.150.000,00	150,00	38,20	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	19 Unit	2.193.862.000	3 Unit	795.650.000	4 Unit	690.085.800	1 Unit	42.500.000	25,00	6,16	4 Unit	838.150.000,00	21,05	38,20	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	72 Bulan	1.910.589.226	12 Bulan	271.459.783	12 Bulan	342.581.950	6 Bulan	144.103.973	25,00	42,06	15 Bulan	415.563.756,00	20,83	21,75	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	37.812.285	12 Laporan	4.314.000	12 Laporan	4.996.000	6 Laporan	3.322.000	0,00	66,49	n/a	7.636.000,00	0,00	20,19	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	841.685.880	100 Laporan	117.020.850	100 Laporan	139.849.450	50 Laporan	72.390.693	50,00	51,76	150 Laporan	189.411.543,00	150,00	22,50	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1.031.091.061	12 Laporan	150.124.933	12 Laporan	197.736.500	6 Laporan	68.391.280	25,00	34,59	15 Laporan	218.516.213,00	20,83	21,19	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	72 Bulan	4.687.485.170	12 Bulan	997.459.997	12 Bulan	986.939.800	6 Bulan	165.353.971	0,00	0,00	18 Bulan	165.353.971	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	1.206.735.170	37 unit	201.809.997	37 unit	360.520.100	52 unit	122.010.561	140,54	33,84	89 unit	323.820.558,00	40,09	26,83	INSPEKTORAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	1.206.735.170	37 unit	201.809.997	37 unit	360.520.100	52 unit	122.010.561	140,54	33,84	89 unit	323.820.558,00	40,09	26,83	INSPEKTORAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3.480.750.000	1 unit	795.650.000	1 unit	626.419.700	1 unit	43.343.410	100,00	6,92	2 unit	838.993.410,00	33,33	24,10	INSPEKTORAT
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan</b>	<b>85 Persen</b>	<b>8.943.662.480</b>	<b>92 Persen</b>	<b>1.548.019.455</b>	<b>78 Persen</b>	<b>4.913.270.000</b>	<b>0 Persen</b>	<b>127.572.750</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0 Persen</b>	<b>127.572.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	70 Persen	4.780.805.615	66 Persen	378.115.600	55 Persen	4.241.370.000	0 Persen	108.722.750	0,00	2,56	66 Persen	486.838.350,00	94,29	10,18	
	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	80 Persen		40 Persen		68 Persen		0 Persen		0,00		0 Persen		0,00		
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	198 Laporan	957.367.350	33 Laporan	114.290.000	33 Laporan	497.470.000	42 Laporan	1.925.000	127,27	0,39	75 Laporan	116.215.000,00	37,88	12,14	INSPEKTORAT
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 Laporan	1.175.231.750	8 Laporan	116.090.000	10 Laporan	487.200.000	20 Laporan	0	200,00	0,00	28 Laporan	116.090.000,00	56,00	9,88	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	271.125.950	2 Laporan	22.290.000	2 Laporan	54.500.000	2 Laporan	4.050.000	100,00	7,43	4 Laporan	26.340.000,00	33,33	9,72	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	557.001.900	1 Laporan	2.850.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	2.475.000	0,00	7,07	n/a	5.325.000,00	0,00	0,96	INSPEKTORAT
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	631.900.000	2 Laporan	42.810.000	6 Laporan	3.018.400.000	0 Laporan	100.272.750	0,00	3,32	2 Laporan	143.082.750,00	5,56	22,64	INSPEKTORAT
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen	1.188.178.665	4 Dokumen	79.785.600	4 Dokumen	148.800.000	0 Dokumen	0	0,00	0,00	4 Dokumen	79.785.600,00	16,67	6,71	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD/Desa di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	62 Persen	4.162.856.865	86 Persen	1.169.903.855	53 Persen	671.900.000	0 Persen	18.850.000	0,00	2,81	86 Persen	1.188.753.855,00	138,71	28,56	
	Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan	100 Persen		100 Persen		100 Persen		0 Persen		0,00		0 Persen		0,00		
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	6 Laporan	438.630.700	2 Laporan	670.468.855	2 Laporan	43.000.000	1 Laporan	9.000.000	0,00	20,93	3 Laporan	679.468.855,00	0,00	154,91	INSPEKTORAT
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	438 Laporan	3.724.226.165	116 Laporan	499.435.000	73 Laporan	628.900.000	76 Laporan	9.850.000	104,11	1,57	192 Laporan	509.285.000,00	43,84	13,67	INSPEKTORAT

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	12 SKPD	5.635.777.103	0 SKPD	1.615.552.628	6 SKPD	1.024.252.400	0 SKPD	188.025.000	0,00	18,36	0 SKPD	1.803.577.628,00	0,00	32,00	
	Level Maturitas SPIP	3		3		3		0		0,00		0,00		0,00		
	Indeks Integritas	82		75,36		79		0		0,00		0,00		0,00		
	Level kapabilitas APIP	3		3		3		0		0,00		0,00		0,00		
Pendampingan dan Asistensi	Prenstase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	100 Persen	5.635.777.103	100 Persen	1.615.552.628	100 Persen	1.024.252.400	0 Persen	188.025.000	0,00	18,36	100 Persen	1.803.577.628,00	100,00	32,00	
	Nilai PMPRB	75 Persen		72,48 Persen		72 Persen		0 Persen		0,00		0 Persen		0,00		
	Persentase Pencapaian Indikator MCP	79 Persen		90 Persen		76 Persen		11 Persen		14,47		11 Persen		13,92		
	Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM	14 SKPD		3 SKPD		8 SKPD		5 SKPD		62,50		5 SKPD		35,71		
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	180 Perangkat Daerah	834.369.515	30 Perangkat Daerah	35.840.000	30 Perangkat Daerah	62.750.000	0 Perangkat Daerah	9.000.000	0,00	14,34	30 Perangkat Daerah	44.840.000,00	16,67	5,37	INSPEKTORAT
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	196 Perangkat Daerah	661.169.340	30 Perangkat Daerah	1.075.006.628	30 Perangkat Daerah	301.600.000	0 Perangkat Daerah	27.300.000	0,00	9,05	30 Perangkat Daerah	1.102.306.628,00	15,31	166,72	INSPEKTORAT
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18 kegiatan	3.230.008.728	3 kegiatan	440.775.000	3 kegiatan	562.612.000	1 kegiatan	151.725.000	33,33	26,97	4 kegiatan	592.500.000,00	22,22	18,34	INSPEKTORAT
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	186 Perangkat Daerah	910.229.520	30 Perangkat Daerah	63.931.000	30 Perangkat Daerah	97.290.400	5 Perangkat Daerah	0	16,67	0,00	35 Perangkat Daerah	63.931.000,00	18,82	7,02	INSPEKTORAT

Berdasarkan tabel diatas, Inspektorat Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mencakup 3 Program, 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran stratejik.

Uraian selengkapnya capaian kinerja per indikator sampai dengan bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran: Rp.74.662.400,- realisasi sebesar Rp.27.374.520,- dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.47.287.880,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 23.978.400,- realisasi sebesar Rp.0,00 sisa pagu anggaran sebesar Rp. 23.978.400,-.

Realisasi kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan bulan juni 50% yaitu telah tersusunnya rancangan Awal Renja Tahun 2024 dan Matrik Renja Perubahan Tahun 2023. Saat ini sedang berproses dokumen Renja Perubahan tahun 2023 dan Renja tahun 2024, sedangkan realisasi keuangan masih 0 karena kegiatan penyusunan masih berjalan sehingga realisasi keuangan akan dilaksanakan pada triwulan III.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 50.684.000,- realisasi sebesar Rp. 27.374.520,- sisa anggaran sebesar Rp.23.309.480,-.

Realisasi kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah telah tersusunnya laporan capaian kinerja sampai dengan triwulan II. Sedangkan Realisasi Keuangan sebesar 54 % yaitu untuk pembayaran gaji tenaga kontrak sampai dengan bulan juni 2023.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebesar Rp. 7.119.790.460,- realisasi sebesar Rp.4.342.695.241,- sisa anggaran sebesar Rp.2.777.095.219,-

Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 50% yaitu telah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 6 bulan yaitu bulan januari sampai dengan bulan juni 2023, sedangkan capaian realisasi keuangan sampai dengan bulan juni sebesar 60% karena adanya beberapa pegawai yang naik pangkat, gaji berkala dan inpasing ke PPUPD.

c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Pagu anggaran sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya adalah sebesar Rp. 105.133.000,- realisasi Rp.29.160.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp. 75.973.000,-

Capaian kinerja sebesar 25% yaitu telah tersedia 1 paket pengadaan baju sasirangan hari jadi Kabupaten Balangan untuk seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan. Sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 27% karena dari 4 paket pengadaan yang telah ditargetkan terdapat 1 paket pengadaan belanja pakaian yang harus disesuaikan akun belanjanya pada APBD perubahan yaitu ke belanja barang dan jasa dari akun belanja sebelumnya belanja modal sedangkan 2 paket pengadaan sedang dalam proses pelaksanaan.

2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Pagu anggaran sebesar Rp.808.890.000,- realisasi sebesar Rp.300.008.892,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.508.881.108,-

Capaian kinerja sebesar 55% yaitu telah mengikutsertakan sebanyak 30 pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi terutama bagi tenaga aparatur pengawas baik Auditor maupun PPUPD dalam rangka pengembangan kompetensi untuk menunjang kegiatan pengawasan.

3) Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan

Pagu anggaran sebesar Rp.2.415.830.000,- realisasi sebesar Rp.66.370.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.2.349.460.000,-

- d. Administrasi umum perangkat daerah
- 1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
 Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 1.244.722.200,- realisasi sebesar Rp.654.630.000  
 Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 25 % yaitu telah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa laptop, printer dan meja kursi kerja.
  - 2) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
 Pagu anggaran sebesar Rp.51.290.000,- realisasi sebesar Rp.21.859.800,- sisa anggaran sebesar Rp.29.430.200,-  
 Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Balangan.
  - 3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
 Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.4.799.700,- realisasi sebesar Rp.2.840.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.1.959.700,-.  
 Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya penyediaan bahan bacaan selama 6 bulan.
  - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
 Pagu anggaran sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 2.337.543.000,- realisasi sebesar Rp.422.695.154,- sisa anggaran sebesar Rp.1.914.847.846,-  
 Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 6 bulan.
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  
 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya  
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar 690.085.800,- realisasi 42.500.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp. 647.585.800,-.  
 Capaian kinerja sebesar 60% yaitu dalam proses pengerjaan pembanguna parkir tahap II, pemasangan knopi rumah jaga, rehab ruang rapat serta pembanguna tempat parkir.

f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp.4.996.000,- realisasi sebesar Rp.3.322.000,- sisa anggaran sebesar Rp.1.674.000,-

Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat selama 6 bulan.

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.139.849.450,- realisasi sebesar Rp.72.390.693,- sisa anggaran sebesar Rp.67.458.757,-.

Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya pembayaran rekening listrik, PDAM, telepon dan wifi pada kantor Inspektorat selama 6 bulan.

3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar Rp.197.736.500,- realisasi sebesar Rp.68.391.280,- sisa anggaran sebesar Rp.129.345.220,-

Capaian kinerja sub kegiatan kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama 6 bulan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp.360.520.100,- realisasi sebesar Rp.122.010.561,- sisa anggaran sebesar Rp.238.509.539,-

Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 6 bulan.

- 2) Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp.626.419.700,- realisasi Rp.43.343.410,- sisa anggaran sebesar Rp.583.076.290,-

Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya selama 6 bulan.

## 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

### a. Penyelenggaraan pengawasan internal

- 1) Pengawasan kinerja pemerintah daerah

Pagu anggaran sub kegiatan Pengawasan kinerja pemerintah daerah sebesar Rp.497.470.000,- realisasi Rp.1.925.000,- sisa anggaran sebesar Rp.495.545.000,-

Capaian kinerja sebesar 127% yaitu dari target 33 LHP realisasi sebanyak 42 LHP. Sedangkan realisasi keuangan masih rendah karena terdapat kesalahan penganggaran belanja terkait uang pengawasan yaitu pada akun belanja honorarium tenaga ahli dan dilakukan perbaikan akun belanja perjalanan dinas dalam daerah pada tahap pergeseran belanja sebelum perubahan, sehingga realisasi belanja baru bisa dilaksanakan setelah selesai proses pergeseran tersebut.

- 2) Pengawasan keuangan pemerintah daerah

Pagu anggaran sub kegiatan Pengawasan keuangan pemerintah daerah sebesar Rp.487.200.000,- realisasi Rp.0,00 sisa anggaran sebesar Rp.487.200.000,-

Capaian kinerja sebesar 200% yaitu dari target 10 LHP realisasi 20 LHP. Sedangkan realisasi keuangan akan dilaksanakan setelah perubahan belanja pada tahap pergeseran.

- 3) Reviu Laporan Kinerja

Pagu anggaran sub kegiatan Reviu laporan kinerja sebesar Rp.54.500.000,- realisasi Rp.4.050.000,- sisa anggaran Rp. 50.450.000,-.

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu telah terealisasi 2 LHP yang terdiri dari Laporan Hasil Reviu LKIP tahun 2022 dan Laporan Hasil Reviu LPPD tahun 2022 dari target 2 LHP. Sedangkan realisasi keuangan akan dilaksanakan setelah perubahan belanja pada tahap pergeseran.

4) Reviu Laporan Keuangan

Pagu anggaran sub kegiatan Reviu laporan keuangan sebesar Rp.35.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.475.000,- sisa anggaran sebesar Rp.32.525.000,-

Capaian kinerja sub kegiatan Reviu laporan keuangan sebesar 100 % yaitu telah dilaksanakan reviu LKPD tahun 2022. Sedangkan realisasi keuangan akan dilaksanakan setelah perubahan belanja pada tahap pergeseran.

5) Pengawasan Desa

Pagu anggaran sub kegiatan Pengawasan Desa sebesar Rp.3.018.400.000,- realisasi sebesar Rp.100.272.750,- .Capaian kinerja sub kegiatan pengawasan desa sebesar 0%.

6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Pagu anggaran sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebesar Rp.148.800.000,- realisasi sebesar Rp.0,00 sisa anggaran sebesar Rp.148.800.000,-

Capaian kinerja masih belum bisa dilaporkan karena rekonsiliasi penyelesaian tindak lanjut dengan BPK akan dilaksanakan di bulan Juli 2023 sedangkan penyelesaian tindak lanjut APIP masih dalam proses monitoring tindak lanjut.

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pagu anggaran sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.43.000.000,- realisasi Rp.9.000.000,- sisa anggaran sebesar Rp.34.000.000,-

Capaian kinerja sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah 50 % yaitu tersusunnya laporan matrik pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester I tahun 2023.

2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pagu anggaran sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp.628.900.000,- realisasi sebesar Rp.9.850.000,- sisa anggaran sebesar Rp.619.050.000,-

Capaian kinerja sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar 104% dari target 73 LHP realisasi 76 LHP.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.62.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- sisa anggaran sebesar Rp.53.750.000,-

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Pagu anggaran sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sebesar Rp.301.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.27.300.000,- sisa anggaran sebesar Rp.274.300.000,-

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pagu anggaran sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar Rp.562.612.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.151.725.000,- sisa anggaran sebesar Rp.410.887.000,-

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar 50 % yaitu telah terselesaikannya rapat koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi dalam rangka pemenuhan data dukung MCP tahun 2023.

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pagu anggaran sub kegiatan Indeks integritas sebesar Rp.97.290.400,- realisasi anggaran 0,00.

Capaian kinerja sub kegiatan Indeks Integritas 20% yaitu telah dilakukan pendampingan dan asistensi kepada 6 SKPD dalam rangka pengusulan unit kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Kabupaten Balangan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Inspektorat sampai dengan bulan juni 2023 telah melakukan pemeriksaan baik yang bersifat reguler maupun mandatory. Hasil dari pemantauan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan eksternal sampai dengan bulan juni tahun 2023 terdapat 899 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 784 rekomendasi atau sebesar (87 %).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2022 telah melakukan:

- a. Audit Ketaatan atas penyelenggaraan pemerintahan desa di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan pada Desa Mampari Kecamatan Batumandi dan Desa Sumber Rezeki Kec. Awayan
- b. Audit dengan tujuan tertentu
  1. Audit Investigatif/PKKN/Khusus sebanyak 9 kasus
  2. Opname Persediaan SKPD Tahun 2021 pada 30 SKPD
  3. Penutupan Kas SKPD Tahun 2021 pada 30 SKPD
  4. Audit Kepatuhan PBJ
- c. Reviu terdiri dari :

1. Reviu LKPD tahun 2022
  2. Reviu LKIP tahun 2002
  3. Reviu LPPD tahun 2022
  4. Reviu PBJ
  5. Reviu DAK
  6. Reviu RKPD Tahun 2023
  7. Reviu RKPD Perubahan Tahun 2022
  8. Reviu KUA PPAS Tahun 2023
  9. Reviu KUA PPAS - Perubahan Tahun 2022
- d. Evaluasi
1. Evaluasi SAKIP pada 30 SKPD
  2. Evaluasi PPRG pada Dinas DPPA
- e. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK & APIP

#### **2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Sesuai Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan an perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan menetapkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan nomor 25 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah pada Bab IV bagian ketiga pasal 6 (enam) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbagian Umum dan Kepagawain
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Balangan melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat dicapai secara optimal.

### 3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, tujuannya adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan. Dengan demikian ditetapkan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif
2. Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan

### 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian

urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Adapun program-program yang diusulkan Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan pada tahun anggaran 2022 ada 3 (Program) sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pengawas
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta menterjemahkan aktivitas/layanan.

Pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Balangan total belanja sebesar Rp 22.119.790.710,- adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2. Program penyelenggaraan pengawas
  - 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - c. Reviu Laporan Kinerja
    - d. Reviu Laporan Keuangan
    - e. Pengawasan Desa
    - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
  - 3.1 Pendampingan dan Asistensi
    - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

### 3.3. Rencana Perubahan Renja

Inspektorat Kabupaten Balangan sejak awal sampai sekarang, telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang yang melekat padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tengah segala keterbatasan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya dari sisi infrastruktur maupun aparatur.

Adapun faktor perubahan renja adalah dikarenakan adanya program dan kegiatan yang tidak bisa untuk direalisasikan serta adanya penambahan kegiatan baru karena kegiatan tersebut dianggap penting untuk dilaksanakan. Adapun rencana perubahan program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.23.978.400,- dan setelah perubahan sebesar Rp.23.978.400,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.0,00.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.50.684.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp.73.784.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.23.100.000,-
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SKPD pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.7.119.790.460,- setelah perubahan sebesar Rp.9.601.306.610,- terdapat pengurangan sebesar Rp.2.481.516.150,-
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.105.133.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp.102.503.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.2.630.000,-

- b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pagu anggaran sebesar Rp.808.890.000,- setelah perubahan sebesar Rp.1.039.095.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.230.205.000,-.
- c. Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.2.415.830.000,- setelah perubahan sebesar Rp.1.901.945.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 513.885.000,-

#### 1.4 Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

- a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.244.722.200,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.303.224.300,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.89.457.600,-
- b. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.51.290.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.51.295.600,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.5.600,-.
- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.4.799.700,- setelah perubahan sebesar Rp.6.748.500,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.1.948.800,-
- d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pagu sebelum perubahan sebesar Rp.2.337.543.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.280.986.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.1.056.557.000,- karena diasumsikan ada kekurangan anggaran untuk memenuhi kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sampai dengan bulan desember.

#### 1.5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- a. Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan pagu sebelum perubahan sebesar Rp.0,00,- setelah perubahan menjadi Rp.1.485.500.000,00 untuk pengadaan mobil dinas Inspektur, Mobil operasional sekretaris, mobil operasional Irbanwil II dan Irban Investigasi, RB dan Koordinator pencegahan Korupsi serta pengadaan 2 kendaraan roda dua.

b. Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.690.085.800,- tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan belanja pada anggaran perubahan.

1.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

a. Penyediaan jasa surat menyurat pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.4.996.000,- setelah perubahan menjadi Rp.10.003.500,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.5.007.500,- penambahan alokasi anggaran ini akan dipergunakan untuk penambahan belanja materai.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.139.849.450,- setelah perubahan menjadi Rp.182.659.950,- terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.602.000,- yang akan dipergunakan untuk pembayaran listrik inspektorat karena alokasi anggaran hanya mampu mengakomodir pembayaran listrik sampai dengan bulan juli sehingga diperlukan penambahan anggaran.

c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor pagu anggaran sebesar Rp.197.736.500,- setelah perubahan menjadi Rp.175.059.700,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.18.050.500,-

1.7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.360.520.100,- setelah perubahan menjadi Rp.420.530.300,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.60.010.200,-

b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.626.419.70000- tidak terdapat penambahna ataupun pengurangan dalam sub kegiatan ini.

2. Program penyelenggaraan pengawas

2.1 Penyelenggaraan pengawasan internal

a. Pengawasan kinerja pemerintah daerah pagu sebelum perubahan sebesar Rp.497.470.000,- setelah perubahan menjadi Rp.375.620.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.121.850.000,-

- b. Pengawasan keuangan pemerintah daerah pagu sebelum perubahan sebesar Rp.487.200.000,- setelah perubahan menjadi Rp.325.050.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.162.150.000,-
- c. Reviu laporan kinerja pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.54.500.000,- setelah perubahan menjadi Rp.16.400.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.38.100.000,-
- d. Reviu Laporan Keuangan pagu anggaran sebesar Rp.35.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp.2.600.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.32.400.000,-
- e. Pengawasan Desa pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.3.018.400.000,- setelah perubahan menjadi Rp.3.105.600.000,- terdapat penambahan sebesar Rp. 87.200.000,-
- f. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.148.800.000,- setelah perubahan menjadi Rp.275.230.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.126.430.000,-

## 2.2 Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

- a. Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah pagu sebelum perubahan sebesar Rp.43.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp.263.638.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.220.638.000,-. Penambahan pagu tersebut dialokasikan untuk kegiatan studi banding program kerja Majelis Tim Majelis Kerugian Daerah dan dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dilingkup pemerintah kabupaten Balangan.
- b. Pengawasan dengan tujuan tertentu pagu sebelum perubahan sebesar Rp.628.900.000,- setelah perubahan menjadi Rp.453.850.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.175.050.000,-

### 3. Program Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

#### 3.1 Pendampingan dan asistensi

- a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.62.750.000,- setelah perubahan menjadi Rp.27.500.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.35.250.000,-
- b. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.301.600.000,- setelah perubahan menjadi Rp.122.800.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.178.800.000,-
- c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.562.612.000,- setelah perubahan menjadi Rp.973.606.000,- terdapat penambahan aloansi anggaran sebesar Rp.410.994.000,- penambahan anggaran ini akan digunakan untuk melaksanakan desk rekonsiliasi pemenuhan data dukung MCP tahun 2023 dengan Tim Verifikator Kemendagri serta melaksanakan studi banding MCP 2023.
- d. Pandampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas dengan pagu anggaran sebesar Rp.97.290.400,- setelah perubahan menjadi 47.490.400,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.49.800.000,-

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel matrik (terlampir).

## BAB IV

### PENUTUP

Perencanaan dan Penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam perencanaan dan penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan sesuai sasaran yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, diharapkan dukungan anggaran yang sesuai dengan usulan yang tertuang dalam naskah ini agar program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat mencapai sasaran. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 202 ini sangat tergantung pada tekad, semangat, dan keinginan untuk maju dengan dukungan sikap mental yang kuat dan disiplin dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Parangin, Juli 2023  
Inspektur Kabupaten Balangan



Drs. Urai Nur Iskandar, MM  
NIP. 19730501 199311 1 001



**TABEL PERUBAHAN TAHUN 2023  
KABUPATEN BALANGAN**

SKPD : INSPEKTORAT

NO	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN					Keterangan/Catatan penting	Unit SKPD
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.000)	Jumlah Perubahan (+/-)		
<b>Total Pagu</b>					<b>22.119.770.710</b>				<b>25.002.883.060</b>	<b>2.883.112.350</b>		<b>Inspektorat</b>
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	Kab. Balangan	72 (BB)	16.182.248.310	Nilai SAKIP Inspektorat	Kab. Balangan	72 (BB)	19.013.498.660	Rp 2.831.250.350,00		Inspektorat
		Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Balangan	100%		Nilai IKM Inspektorat	Kab. Balangan	87,88%				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	Kab. Balangan	100%	74.662.400	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	100%	97.762.400	Rp 23.100.000,00		Inspektorat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 Dokumen	23.978.400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 Dokumen	23.978.400	Rp -		Inspektorat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	4 Laporan	50.684.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	4 Laporan	73.784.000	Rp 23.100.000,00		Inspektorat
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Balangan	100%	7.119.790.460	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	9.601.306.610	Rp 2.481.516.150,00		Inspektorat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Balangan	616 orang	7.119.790.460	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Balangan	630 orang	9.601.306.610	Rp 2.481.516.150,00	Asumsi terdapat penambahan 34 pegawai	Inspektorat
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Balangan	100%	3.329.853.000	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	3.043.543.000	-Rp 286.310.000,00		Inspektorat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Balangan	4 paket	105.133.000	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Balangan	4 paket	102.503.000	-Rp 2.630.000,00		Inspektorat
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Balangan	55 pegawai	808.890.000	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Balangan	65 pegawai	1.039.095.000	Rp 230.205.000,00		Inspektorat

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	32 pegawai	2.415.830.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	20 pegawai	1.901.945.000	-Rp 513.885.000,00		Inspektorat
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Balangan	100%	3.638.334.900	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	2.673.209.900	-Rp 965.125.000,00		Inspektorat
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	7 paket	1.244.722.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	9 paket	1.334.179.800	Rp 89.457.600,00		Inspektorat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	2 paket	51.290.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	2 paket	51.295.600	Rp 5.600,00		Inspektorat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	120 dokumen	4.779.700	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	120 dokumen	6.748.500	Rp 1.968.800,00		Inspektorat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	65 laporan	2.337.543.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	65 laporan	1.280.986.000	-Rp 1.056.557.000,00		Inspektorat
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	Kab. Balangan	100%	690.085.800	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Balangan	100%	2.175.585.800	Rp 1.485.500.000,00		Inspektorat
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Balangan	0	0.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Balangan	6 unit	1.485.500.000	Rp 1.485.500.000,00		Inspektorat
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Balangan	4 unit	690.085.800	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Balangan	4 unit	690.085.800	Rp -		Inspektorat
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Balangan	12 Bulan	342.581.950	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Kab. Balangan	100%	375.140.950	Rp 32.559.000,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	12 laporan	4.996.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	12 laporan	10.003.500	Rp 5.007.500,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	36 laporan	139.849.450	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	36 laporan	185.451.450	Rp 45.602.000,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 laporan	197.736.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 laporan	179.686.000	-Rp 18.050.500,00		Inspektorat
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Balangan	12 Bulan	986.939.800	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	1.046.950.000	Rp 60.010.200,00		Inspektorat

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Balangan	35 unit	360.520.100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Balangan	42 unit	420.530.300	Rp 60.010.200,00		Inspektorat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	3 unit	626.419.700	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	3 unit	626.419.700	Rp -		Inspektorat
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Kab. Balangan	78%	4.913.270.000	Presentase SKPD yang selesai TLHP	Kab. Balangan	50%	4.817.988.000	-Rp 95.282.000,00		Inspektorat
		Presentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik	Kab. Balangan			50%						
		Presentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari	Kab. Balangan			50%						
8	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	% SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	Kab. Balangan	55%	4.241.370.000	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LHE	Kab. Balangan	15	4.100.500.000	-Rp 140.870.000,00		Inspektorat
		Persentase SKPD di Wilayah yang bebas		68%			150					
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	33 Laporan	497.470.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	33 Laporan	375.620.000	-Rp 121.850.000,00		Inspektorat
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	10 laporan	487.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	10 laporan	325.050.000	-Rp 162.150.000,00		Inspektorat
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Balangan	2 laporan	54.500.000	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Balangan	2 laporan	16.400.000	-Rp 38.100.000,00		Inspektorat
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Balangan	1 laporan	35.000.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Balangan	1 laporan	2.600.000	-Rp 32.400.000,00		Inspektorat
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Balangan	6 laporan	3.018.400.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Balangan	6 laporan	3.105.600.000	Rp 87.200.000,00		Inspektorat
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Kab. Balangan	4 dokumen	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Balangan	4 dokumen	275.230.000	Rp 126.430.000,00		Inspektorat

9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	Kab. Balangan	53%	671.900.000	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani	Kab. Balangan	100%	717.488.000	Rp 45.588.000,00		Inspektorat
		Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan	Kab. Balangan	100%		Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Kab. Balangan	4,028				
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kab. Balangan	2 laporan	43.000.000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kab. Balangan	2 laporan	263.638.000	Rp 220.638.000,00		Inspektorat
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Balangan	73 Laporan	628.900.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Balangan	73 laporan	453.850.000	-Rp 175.050.000,00		Inspektorat
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Kab. Balangan	- WBK :3 - WBBM : 3	1.024.252.400	Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM	Kab. Balangan	20	1.171.396.400	Rp 147.144.000,00		Inspektorat

		Level Maturitas SPIP	Kab. Balangan	3		Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	Kab. Balangan	80				
		Indeks Integritas	Kab. Balangan	79		Nilai MCP	Kab. Balangan	91				
		Level kapabilitas APIP	Kab. Balangan	3								
10	Pendampingan dan Asistensi	prentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	Kab. Balangan	100%	1.024.252.400	Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI menuju WBK/WBBM	Kab. Balangan	100%	1.171.396.400	Rp 147.144.000,00		Inspektorat
		Nilai PMPRB	Kab. Balangan	72		Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti	Kab. Balangan	80				
		Persentase Pencapaian Indikator MCP	Kab. Balangan	77		Prosentase Indikator MCP yang terjawab/terpenuhi	Kab. Balangan	91				
		Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM	Kab. Balangan	WBK :4 WBBM:4								
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	30 Perangkat daerah	62.750.000	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	30 Perangkat daerah	27.500.000	-Rp 35.250.000,00		Inspektorat
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Balangan	15 perangkat daerah	301.600.000	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Balangan	30 perangkat daerah	122.800.000	-Rp 178.800.000,00		Inspektorat
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Balangan	1 kegiatan	562.612.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Balangan	1 kegiatan	973.606.000	Rp 410.994.000,00		Inspektorat
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Balangan	21 perangkat daerah	97.290.400	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Balangan	5 perangkat daerah	47.490.400	-Rp 49.800.000,00		Inspektorat

Paringin, Juli 2023  
 Inspektur Kabupaten Balangan,  
  
 Drs. Urai Nur Iskandar, MM  
 NIP. 19730501 199311 1 001